

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Reformasi pengelolaan negara diawali dengan bergulirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan *Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer* atau IAR (*Staatsblad* 1898 Nomor 9 sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1933 Nomor 320) menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam perkembangannya, era reformasi ini telah turut mempengaruhi paradigma pengelolaan maupun pelaporan keuangan daerah secara signifikan. Perubahan paradigma tersebut diawali dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan aturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan diberlakukannya otonomi ini, Pemerintah Daerah menerima limpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam mengurus rumah tangga daerahnya sendiri yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan

Indriya Kartika, 2013

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Meskipun demikian, urusan pemerintahan tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional masih diatur Pemerintah Pusat.

Disamping undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak saja harus mengalokasikan dana publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tetapi juga harus mengelola dana publik sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Good governance khususnya di bidang keuangan negara/daerah adalah pilar utama menuju *clean government*. Demi terwujudnya *good governance* maka dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan transparansi dan akuntabilitas publik. Pemerintahan yang transparan dapat dilihat dari adanya kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi secara akurat dan memadai bagi mereka yang membutuhkan. Sedangkan akuntabel berhubungan dengan pertanggungjawaban pemerintah kepada *stakeholder* atas setiap aktivitas yang dilakukannya (Mardiasmo, 2009:18).

Indriya Kartika, 2013

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Menurut hasil penelitian Bozz-Allen dan Hamilton (dalam Sadeli, 2008:102) serta Huther dan Shah (2000), tahun 1999 Indonesia menduduki peringkat paling rendah dalam hal indeks *good governance* dan kualitas *governance* dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. Besarnya indeks *good governance* Indonesia hanya sebesar 2,88 dibawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72), Thailand (4,89) dan Filipina (3,47). Kualitas *governance* Indonesia tergolong dalam kategori *poor governance* (pemerintahan yang buruk), sementara Malaysia dan Singapura tergolong dalam kategori *good governance* (pemerintahan yang baik) serta Thailand dan Filipina tergolong dalam kategori *fair governance* (pemerintahan yang cukup baik). Indeks *good governance* dan kualitas *governance* ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat *good governance* menunjukkan pula bahwa akuntabilitas belum berjalan sepenuhnya.

Tabel 1.1
***Good Governance* di Asia Tenggara 1999**

| NEGARA | Indeks Efisiensi Peradilan | Indeks Korupsi | Indeks <i>Good Governance</i> | Kategori Kualitas <i>Governance</i> |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| Malaysia | 9,00 | 7,38 | 7,72 | <i>Good Governance</i> |
| Singapura | 10,00 | 8,22 | 8,93 | <i>Good Governance</i> |
| Thailand | 3,25 | 5,18 | 4,89 | <i>Fair Governance</i> |
| Filipina | 4,75 | 7,92 | 3,47 | <i>Fair Governance</i> |
| Indonesia | 2,50 | 2,15 | 2,88 | <i>Poor Governance</i> |

Sumber: ihyaul.staff.umm.ac.id

Adapun kriteria penentuan kategori kualitas *governance* adalah sebagai berikut:

Indriya Kartika, 2013

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1.2
Kriteria Kualitas *Good Governance*

| <i>Governance Quality Index</i> | Kategori |
|---------------------------------|------------------------|
| 61-80 | <i>Good Governance</i> |
| 41-60 | <i>Fair Governance</i> |
| 21-40 | <i>Poor Governance</i> |

Sumber: Huther and Shah

Sementara indeks *good governance* Provinsi Jawa Barat dapat terlihat dalam tabel berikut:

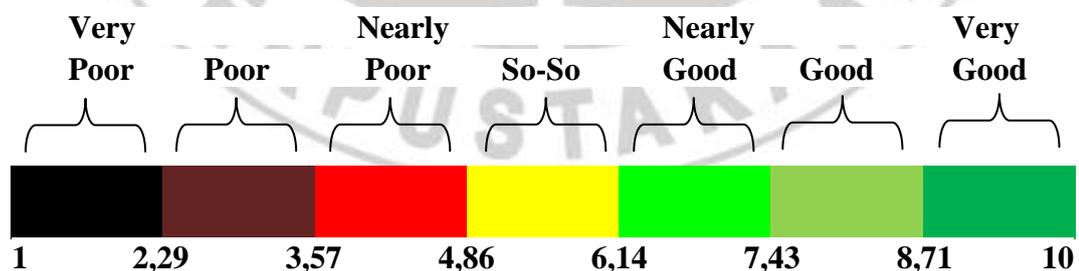
Tabel 1.3
Indeks *Governance* Provinsi Jawa Barat

| Prinsip | Indeks |
|---------------|--------|
| Partisipasi | 5.07 |
| Kewajaran | 2.41 |
| Akuntabilitas | 5.73 |
| Transparansi | 5.68 |
| Efisiensi | 8.68 |
| Efektivitas | 5.70 |

Sumber: kemitraan.co.id

Berikut kriteria kategori *governance*:

Gambar 1.1
Index Scale Governance



Sumber: kemitraan.co.id

Berdasarkan tabel dan kriteria tersebut maka partisipasi (5.07) maka tergolong dalam kategori *so-so governance*, kewajaran (2.41) maka tergolong

Indriya Kartika, 2013

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam kategori *poor governance*, akuntabilitas (5.73) maka tergolong dalam kategori *so-so governance*, transparansi (5.68) maka tergolong dalam kategori *so-so governance*, efisiensi (8.68) maka tergolong dalam kategori *good governance*, dan efektivitas (5.70) maka tergolong dalam kategori *so-so governance*. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah Provinsi Jawa Barat belum berjalan sepenuhnya. Berikut rincian akuntabilitas per indikator pemerintah Provinsi Jawa Barat:

Tabel 1.4
Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat

| Kode | Indikator | Indeks |
|-------------|---|---------------|
| G1A1 | Koherensi antara Target Pencapaian Pembangunan Tahunan dalam LKPJ dengan tiga target utama dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) | 4.00 |
| G1A2 | Rasio ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan program pemerintah daerah (dalam %) | 7.47 |
| G1A3 | Rasio dalam rancangan APBD menjadi APBD tanpa perubahan asumsi dasar, situasi darurat dan perubahan kebijakan nasional. | 9.82 |
| G2A1 | Ketepatan waktu dalam pemberlakuan Peraturan Daerah tentang APBD | 7.00 |
| G3A1 | Rasio Hibah/subsidi dan bantuan sosial untuk belanja barang dan jasa | 3.66 |
| G4A1 | Komitmen DPRD dalam mempertimbangkan aspirasi publik | 4.60 |

Sumber: kemitraan.co.id

Dari tabel tersebut terlihat bahwa indeks indikator rasio hibah/subsidi dan bantuan sosial untuk belanja barang dan jasa (3.66) yang merupakan indeks terendah, kemudian koherensi antara Target Pencapaian Pembangunan Tahunan dalam LKPJ dengan tiga target utama dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) (4.00), komitmen DPRD dalam mempertimbangkan

Indriya Kartika, 2013

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

aspirasi publik (4.60), ketepatan waktu dalam pemberlakuan Peraturan Daerah tentang APBD (7.00), rasio ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan program pemerintah daerah (dalam%) (7.47), dan rasio dalam rancangan APBD menjadi APBD tanpa perubahan asumsi dasar, situasi darurat dan perubahan kebijakan nasional (9.82).

Fenomena di masyarakat yang menggambarkan akuntabilitas keuangan belum berjalan sepenuhnya antara lain, tingkat korupsi yang masih tinggi, adanya kebocoran anggaran yang timbul akibat praktek pencairan dana yang tidak sesuai dengan anggaran dana yang tersedia, dibuktikan dengan masih banyaknya kebocoran anggaran yang timbul akibat praktek pencairan dana yang tidak sesuai dengan anggaran dana yang tersedia, sementara penerima dana harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran dana yang ditetapkan. Akibatnya penerima dana akan berusaha untuk memperoleh bukti transaksi guna mendukung pertanggungjawaban tersebut sehingga pertanggungjawaban realisasi anggaran sebagai wujud akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah berisi pertanggungjawaban yang diragukan kebenarannya (Widyaningsih, 2009:9).

Pertanggungjawaban pemerintah kepada *stakeholder* dalam memberikan informasi dan mengungkapkan aktivitas serta kinerja finansialnya dilakukan melalui penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. *Governmental Accounting Standards Board (GASB)* dalam *Concepts Statement No. 1* tentang *Objectives of Financial Reporting* (dalam Mardiasmo, 2009:162) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah.

Indriya Kartika, 2013

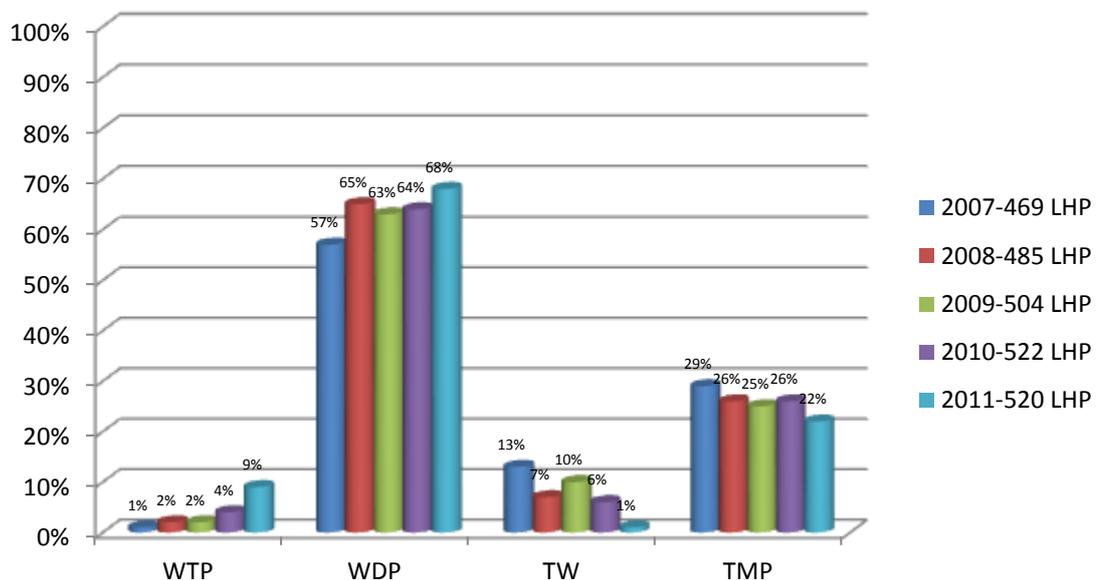
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Fakta mengenai rendahnya kualitas laporan keuangan tercermin dalam opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada Semester II Tahun 2012, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2011 pada 94 pemerintah provinsi/ kabupaten/kota. Dengan demikian, selama tahun 2011 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas 520 LKPD Tahun 2011 dari 524 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 67 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 349 LKPD, opini Tidak Wajar (TW) atas 8 LKPD dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 96 LKPD.

Perkembangan opini LKPD tahun 2007 s.d. 2011 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Grafik Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007 - 2011



Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012

Indriya Kartika, 2013

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sedangkan opini BPK yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat

| No. | Entitas Pemerintah Daerah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Kabupaten Bandung | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 2. | Kabupaten Bandung Barat | - | TMP | TMP | TMP | WDP |
| 3. | Kabupaten Bekasi | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 4. | Kabupaten Bogor | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 5. | Kabupaten Ciamis | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 6. | Kabupaten Cianjur | TMP | WDP | TMP | WDP | WDP |
| 7. | Kabupaten Cirebon | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 8. | Kabupaten Garut | TMP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 9. | Kabupaten Indramayu | TMP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 10. | Kabupaten Karawang | TMP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 11. | Kabupaten Kuningan | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 12. | Kabupaten Majalengka | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 13. | Kabupaten Purwakarta | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 14. | Kabupaten Subang | TMP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 15. | Kabupaten Sukabumi | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 16. | Kabupaten Sumedang | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |
| 17. | Kabupaten Tasikmalaya | WDP | WDP | WDP | WDP | WDP |

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2012

Anggota BPK Ali Masykur Musa menyatakan bahwa hasil audit BPK menggambarkan tingkat kualitas pengelolaan keuangan negara sejak 2007-2011 buruk. Bahkan, sejumlah laporan keuangan pemerintah hingga akhir 2009 banyak ditemukan *disclaimer* (menolak memberikan opini) karena terjadi pelanggaran

Indriya Kartika, 2013

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penggunaan anggaran. Lantas pada 2010 sejumlah audit lembaga negara wajar dengan pengecualian. (www.tempo.co dikutip tanggal 18 Februari 2013)

Salah satu kriteria pemberian opini terhadap laporan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah penilaian kepatuhan terhadap perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2012, terdapat 5.776 kasus senilai 3,78 triliun sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang ditemukan pada 426 entitas. Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan
Peundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun 2011

| No. | Kelompok Temuan | Jumlah Kasus | Nilai (juta Rp) |
|---|---------------------------|--------------|---------------------|
| <i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:</i> | | | |
| 1. | Kerugian Daerah | 1.609 | 865.376,78 |
| 2. | Potensi Kerugian Daerah | 354 | 1.603.922,08 |
| 3. | Kekurangan Penerimaan | 945 | 411.985,75 |
| 4. | Administrasi | 2.318 | - |
| 5. | Ketidakhematan/Pemborosan | 231 | 183.959,04 |
| 6. | Ketidakefisienan | 2 | 537,50 |
| 7. | Ketidakefektifan | 317 | 718.080,27 |
| Jumlah | | 5.776 | 3.783.861,42 |

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2012

Indriya Kartika, 2013

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2012, nilai ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas LKPD Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7
Daftar Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peundang-undangan dalam Pemeriksaan LKPD Kabupaten Provinsi Jawa Barat Tahun 2011

| No. | Entitas | Kerugian Daerah | Potensi Kerugian Daerah | Kekurangan Penerimaan | Administrasi | Ketidakhematan | Ketidakefisienan | Ketidakefektifan |
|-----|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 1. | Kab. Bandung | 6.006,40 | 2.063,43 | 671,08 | 6 | - | - | - |
| 2. | Kab. Bandung Barat | 206,05 | - | 68,36 | 5 | - | - | - |
| 3. | Kab. Bekasi | 380,44 | 4.829,96 | 9.031,65 | 1 | 94,00 | - | - |
| 4. | Kab. Bogor | 1.365,72 | - | 1.664,40 | 3 | 34,16 | - | - |
| 5. | Kab. Ciamis | 295,54 | 3.653,10 | 55,30 | 6 | 219,70 | - | 3,89 |
| 6. | Kab. Cianjur | 748,31 | 182,46 | 455,91 | 2 | - | - | 102,74 |
| 7. | Kab. Cirebon | 2.913,20 | - | 577,36 | 6 | - | - | 40,00 |
| 8. | Kab. Garut | 300,48 | 11,03 | 44,26 | 3 | - | - | - |
| 9. | Kab. Indramayu | 657,59 | 72.869,54 | 599,97 | 1 | - | - | - |
| 10. | Kab. Karawang | 817,56 | - | 3.202,19 | 7 | - | - | - |
| 11. | Kab. Kuningan | 343,26 | 1.609,75 | 751,46 | 6 | - | - | 20.373,41 |
| 12. | Kab. Majalengka | 121,99 | - | 97,07 | 1 | - | - | - |
| 13. | Kab. Purwakarta | 4.211,07 | - | 250,53 | 5 | 16,38 | - | - |
| 14. | Kab. Subang | 202,55 | - | - | 2 | - | - | - |
| 15. | Kab. Sukabumi | 1.357,59 | 178,40 | 163,04 | 4 | - | - | - |
| 16. | Kab. Sumedang | 386,97 | - | 1,23 | 9 | 766,49 | - | 2.812,00 |
| 17. | Kab. Tasikmalaya | 596,72 | - | - | 4 | - | - | 875,00 |

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2012

Selain penilaian atas kepatuhan terhadap perundang-undangan, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan efektivitas sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan

Indriya Kartika, 2013

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan (Bastian, 2011:450).

Menurut hasil evaluasi yang dilakukan BPK atas sistem akuntansi dan prosedur pengamanan kekayaan/keuangan pemerintah daerah, atau yang biasa dikenal dengan sistem pengendalian intern (SPI), laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) pada umumnya memiliki sistem pengendalian intern yang lebih baik dibanding yang memperoleh opini tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP).

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Nur yasin menjelaskan bahwa akar permasalahan rendahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Indonesia adalah kegagalan Kementerian, Lembaga Negara, BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). (www.jurnalparlemen.com dikutip tanggal 22 Juli 2013)

Atas berbagai kelemahan tersebut, maka untuk mencapai pengelolaan keuangan yang negara/daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian Intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki fungsi untuk memberi keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan

Indriya Kartika, 2013

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap undang-undang.

Melalui penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPI) diharapkan upaya perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan dapat lebih dipacu sehingga ke depan dapat memperoleh opini yang semakin baik. Sebab laporan keuangan yang memperoleh opini WTP berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selain itu, sistem pengendalian intern (SPI) yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara (BPK, 2012:5).

Akuntabilitas keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tergolong dalam kategori *so-so governance* sehingga pertanggungjawaban pemerintah kepada *stakeholders* merupakan pertanggungjawaban yang masih diragukan kebenarannya. Selain itu, LKPD yang memperoleh opini Wajar WTP masih rendah, sementara LKPD yang memperoleh opini WDP, TW bahkan TMP masih sangat tinggi. Akuntabilitas keuangan dan kualitas laporan keuangan yang masih rendah salah satunya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern, yaitu penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang belum dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkajinya kembali melalui suatu penelitian dengan judul: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern**

Indriya Kartika, 2013

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana gambaran Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana gambaran Akuntabilitas Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat.
4. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat.
5. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat.
6. Bagaimana pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat.

7. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat, untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Dalam kaitannya dengan masalah ini, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui gambaran Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Indriya Kartika, 2013

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Untuk mengetahui gambaran Akuntabilitas Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat.
7. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari penulisan penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1.4.1 Aspek Teoritis

Bagi penulis dapat bertambah pengetahuan mengenai bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam pengaruhnya menentukan Kualitas Laporan Keuangan sehingga Akuntabilitas Keuangan dapat terwujud.

Indriya Kartika, 2013

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Penelitian Pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sedangkan bagi dunia akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur Akuntansi Sektor Publik terutama dalam pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan dapat dijadikan dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai *user* utama dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang mana dalam pelaksanaannya dapat menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting karena laporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas keuangan.